



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 819/VI/2014

11/JUNI 2014



PARLIAMENTARY ASSEMBLY (APA)
ECONOMIC AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT AFFAIRS
KARTASURA, INDONESIA. 3-4 JUNE 2014



Sidang APA Berlangsung Dinamis dan Konstruktif

KEGIATAN DPR-RI AWAL JUNI 2014

Rapat Paripurna 26 Mei 2014 sebagaimana yang dilaporkan minggu lalu, mengagendakan Pandangan Umum berbagai Fraksi terkait Keterangan Pemerintah tentang Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2015. Berikut ringkasan pandangan fraksi-fraksi.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat (FPD). Partai Demokrat memperkirakan, perekonomian global tahun 2015 akan lebih baik dibanding tahun 2014, demikian juga kondisi perekonomian domestik diperkirakan terus mengalami perbaikan. Terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2015 yang telah diajukan pemerintah, FPD berpandangan, [1] meminta kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali atas sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMN tahap kedua; [2] Pemerintah perlu memperhatikan fenomena peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, namun mendukung langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, khususnya kebijakan perluasan basis pajak dan optimalisasi PNPB; [3] belanja Pemerintah tahun 2015 mampu harus menstimulasi perekonomian dengan tetap mengendalikan defisit dalam batas aman serta menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah harus meningkatkan alokasi belanja modal untuk infrastruktur dalam rangka meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi.

Pandangan Fraksi Partai Golkar (FPG). Secara domestik, tahun 2015 adalah tahun transisi Pemerintahan sehingga ruang fiskal yang lebih terbuka perlu disiapkan bagi pemerintahan baru. FPG berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi (sebesar 5,5-6,0%) pada tahun 2015 masih dapat ditingkatkan, hal ini berkaca dari optimisme pertumbuhan ekonomi dunia yang terbaca dari beragam prediksi lembaga ekonomi dunia serta suksesnya transisi kepemimpinan nasional yang akan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Selain itu, FPG meminta penjelasan Pemerintah menyangkut besaran lifting minyak dan gas bumi, mengingat usulan Pemerintah dalam perubahan APBN 2014 jauh lebih rendah dari asumsi APBN 2014 yang telah ditetapkan bersama. Se-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



dangkan dari sisi postur APBN 2015, FPG mengharapkan peningkatan penerimaan pajak yang lebih tinggi. FPG menyetujui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2015 untuk dibahas lebih lanjut.

Pandangan Fraksi PKB (FKB). FKB berpendapat bahwa rentang target pertumbuhan ekonomi 2015 cukup konservatif dan dapat tercapai dengan didukung tingginya laju konsumsi rumah tangga dan investasi/PMTB, serta membaiknya perekonomian global yang menopang peningkatan kinerja ekspor dan impor. Proyeksi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun 2015 serta proyeksi lifting minyak dan gas bumi 2015 dalam asumsi dasar ekonomi makro 2015, perlu dilakukan upaya asesment dan kerja keras oleh Pemerintah bersama stakeholder terkait dalam merealisasikannya. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pencapaian lifting minyak dan gas bumi beberapa tahun terakhir meleset dari target, sehingga berpengaruh langsung menambah defisit anggaran APBN. FKB mendorong Pemerintah untuk meningkatkan tax ratio menjadi sekitar 14-16 persen. Khusus untuk kebijakan subsidi, FKB berpendapat bahwa alokasi anggaran subsidi, yaitu energi dan non energi, harus dikelola secara efisien dan diarahkan lebih tepat sasaran guna memperbaiki kualitas belanja negara. FPKB setuju melanjutkan pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2015 ke tahap selanjutnya.

Pandangan Fraksi PDIP (FPDIP). APBN 2015 disusun dalam kondisi yang tersisa dari pemerintahan SBY-Boediono, sehingga hendaknya memberi ruang fiskal yang cukup bagi Pemerintahan baru. Pemerintah harus menekan pertumbuhan dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan, daripada hanya memperhatikan pertumbu-



han ekonomi yang tinggi. Perkiraan angka inflasi tahun 2015 berada pada kisaran 3,0-5,0 persen, adalah angka yang cukup aman. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah, karena inflasi yang rendah dan stabil merupakan kunci perekonomian yang sehat. FPDIP setuju untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah terhadap keterangan Pemerintah mengenai Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015 sepanjang pembahasan RAPBN 2015 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pandangan Fraksi PKS (FKS). FPKS memandang bahwa potensi ekonomi nasional memungkinkan untuk tumbuh lebih berkualitas. Pertumbuhan perlu didorong menuju kisaran 6-7% dan menuju dua digit pada lima tahun mendatang. Pertumbuhan yang lebih berkualitas dan tinggi juga sangat penting melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang terus menurun sejak tahun 2011, yang sangat mengkhawatirkan. Terkait target penurunan kemiskinan 2015 sebesar 9-10%, FPKS memandang perlu dibuat lebih progresif di kisaran 8-9%. FPKS meyakini Indonesia memiliki peluang besar untuk menaikkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. FPKS mendesak BI untuk melonggarkan kebijakan moneter ketat, terutama untuk menurunkan suku bunga acuan (BI rate) agar mendorong turunnya cost of fund bagi dunia usaha. Terkait pengurangan pengangguran, PKS memandang bahwa kedepan dibutuhkan penciptaan lapangan kerja yang lebih tinggi, sehingga pengangguran bisa ditekan dibawah 5%. FPKS memandang perlu mengubah paradigma dalam pembiayaan defisit dan pengelolaan utang negara, penerbitan surat utang perlu didesain lebih rendah, agar utang negara menurun tidak hanya sebagai presentasi dari PDB tapi juga secara absolut.

Pandangan Fraksi PAN (FPAN). Pemerintahan baru harus langsung bekerja untuk memanfaatkan momentum Perubahan APBN 2014 ke 2015, sehingga perlu kebijakan strategis dan langkah-langkah inovatif. Masih ada potensi inflasi yang melampaui asumsi 4,0%+/-1%. Terkait asumsi nilai tukar rupiah, FPAN memandang keharusan agar terjaga dari volatilitas yang cenderung tidak stabil. Pemerintah bersama BI harus mengawasi volatilitas yang terlalu ekstrem dan penguatan yang terlalu berlebihan, khususnya terkait kecenderungan “deindustrialisasi”, karena nilai tukar yang terlalu kuat membuat kecenderungan impor barang menjadi tinggi dan ekspor menurun. FPAN meminta Pemerintah melakukan analisis dan kajian mengenai asumsi harga minyak yang ditetapkan Pemerintah. FPAN memandang bahwa kebijakan fiskal 2015 masih membutuhkan peningkatan kebijakan yang lebih progresif untuk mendorong dinamika sektor riil dan pengembangan industri nasional.

Fraksi Partai Gerindra, berpandangan perlunya percepatan paradigma pembangunan yang mengarah pada upaya pembangunan desa, khususnya sektor pertanian. Transformasi struktural ekonomi hanya akan terjadi bila ada kemauan membalik arah pembangunan. Gerindra sepakat mengenai pentingnya peningkatan sumber-sum-

ber pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja negara. Untuk optimalisasi pendapatan negara, Gerindra berpandangan; pertama, meningkatkan penerimaan pajak, kedua, meningkatkan ketaatan pajak bagi badan dan korporasi. Ketiga, memberlakukan pajak untuk tiap uang yang mau keluar negeri, keempat, memberantas mafia Migas yang konon kabarnya mendapat keuntungan besar dari dari impor BBM. Kelima, melakukan eskplorasi sektor kelautan dan perikanan.

Fraksi PPP menilai bahwa perbaikan kerangka ekonomi makro 2015 memerlukan kerja keras. FPPP meminta Pemerintah untuk memiliki formula yang konsisten dalam memecahkan masalah tingginya importasi BBM dan importasi komoditas pangan. Terkait dengan postur fiskal tahun 2015, FPPP meminta Pemerintah memberikan perhatian terhadap sisi pengeluaran anggaran agar lebih produktif bagi penguatan ekonomi. FPPP meminta, pertama, agar penerimaan dalam negeri tahun 2015 meningkat lebih tinggi dibanding dengan kenaikan belanja negara. Kedua, Pemerintah memperbaiki pos-pos pengeluaran dalam fiskal 2015, agar lebih produktif dengan mendorong postur anggaran belanja Pemerintah Pusat tidak terbebani pengeluaran belanja pegawai. Ketiga, Pemerintah mewaspadai tahun fiskal 2015 untuk diarahkan pada kondisi hutang luar negeri. Keempat, kerangka makro dan fiskal 2015 harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah-masalah pangan, energi, infrastruktur dan kemiskinan serta pengangguran.

Pandangan Fraksi Hanura, meminta pemerintah untuk melakukan strategi yang tepat dalam menghadapi situasi ekonomi tahun 2015. Strategi yang dimaksud diantaranya; pertama, melakukan sosialisasi mengenai ASEAN Economic Community dan ASEAN Free Trade Area kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pelaku usaha. Kedua, meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan skill dan pembangunan networking. Ketiga, perbaikan insfrastruktur dengan cara meningkatkan kualitas belanja infrastruktur. Keempat, peningkatan daya saing ekonomi. Kelima, peningkatan laju eskpor. Keenam, reformasi regulasi pemerintahan dan kelembagaan. Ketujuh, reformasi iklim investasi melalui perbaikan insfrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan juga memangkas ekonomi biaya tinggi.

Terkait kerangka ekonomi makro 2015, masukan Hanura diantaranya; pertama, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan anggaran yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dibidang kedaulatan pangan, Pemerintah perlu mengupayakan pemantapan dan pencapaian swasembada pangan secara berkelanjutan. Ketiga, dibidang kedaulatan energi, Hanura menekankan agar mempercepat upaya diversifikasi energi dan konversi dari BBM ke energi lainn, seperti tenaga air, geothermal, batubara dan lainnya. Hanura setuju akan materi Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN tahun 2015, untuk di bahas dan ditindaklanjuti. ****

Sidang APA Berlangsung Dinamis dan Konstruktif



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung berdialog dengan delegasi APA

Pembahasan keempat draft resolusi, yaitu draft resolusi *Integrated Energy Market in Asia*, draft resolusi *Alleviating Poverty in Asia*, draft resolusi *Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia*, dan draft resolusi internasional financial affairs for the Countries of APA Member Parliaments, telah berlangsung sangat dinamis dan konstruktif.

Sidang *The Standing Committee meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Asian Parliamentary Assembly (APA)* yang berlangsung di Jakarta, tanggal 3 dan 4 Juni dihadiri 12 negara anggota APA, yakni Saudi Arabia, Pakistan, Indonesia, Srilanka, Bahrain, Yordania, Iran, Kamboja, Turki, Malaysia, Siprus dan RRT.

Dalam keterangannya dengan Pers usai penutupan sidang, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Surahman Hidayat mengatakan, dalam sidang ini Indonesia telah mengusulkan empat draft resolusi dan telah dibahas dalam sesi-sesi *drafting* resolusi pada hari ke dua sidang.

Draft resolusi mengenai *Financial Affairs for the Countries of APA Member Parliaments* mendapatkan banyak penguatan

kepada kerjasama antar negara-negara APA untuk melakukan penguatan ekonomi nasional dan regional dari bahaya krisis ekonomi berikutnya, baik tingkat regional maupun global.

Sedang draft resolusi *Environmental Issues, Global Warming, Climate Change, and Planting Billions of Trees throughout Asia*, fokus prioritas ditekankan agar masing-masing negara anggota APA dapat melaksanakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam paradigma pembangunan nasionalnya, sehingga bisa menghindarkan diri dari perubahan iklim, pemanasan global, degradasi dan deforestasi hutan.

Surahman menambahkan, dalam draft resolusi *Alleviating Poverty in Asia*, semua partisipan menyepakati tentang perlunya keterlibatan aktif parlemen untuk turut menuntaskan

Sedang draft resolusi *Integrated Energy Market in Asia*, ditekankan perlunya mekanisme bersama melalui ide *Asian Integrated Energy Market*, yang akan dapat mengurangi resiko ketiadaan pasokan energi dalam konteks distribusi, penggunaan maupun preservasinya.

Dalam sidang ini, anggota sidang menyampaikan ragam

usulan dan pendapat, di antaranya perlunya kerjasama dengan negara-negara lain di luar Asia terkait energi dan efisiensi penggunaan energi.

Selain itu juga mengusulkan perlunya penjelasan tentang manfaat dan kelemahan bila di terapkan “*Integrated Asian Energi Market*”, keterlibatan pihak swasta, dan kebutuhan di selenggarakannya Asian Energi Forum.

Surahman mengatakan, dinamika diskusi sidang menghantarkan pada dua ide solusi, yakni dibentuknya badan yang menangani hal ini, atau di selenggarakannya konfe-

rensi untuk membahas isu/aspek “*Integrated Asian Energi Market*”, serta munculnya dua skema yang di ajukan, yakni kebutuhan regulasi terkait hal ini, dan kebutuhan infrastruktur yang menghubungkan konektivitas negara-negara di Asia.

Sekretariat APA mengusulkan agar semua delegasi memberikan komentar dan rekomendasinya terkait ide dibentuknya *advisory committee* atau diselenggarakannya konferensi internasional pada masa 4 (empat) bulan ke depan. Usulan ini akan dibawa ke pertemuan *Executive Council* APA mendatang. (tt)/foto:iwan armanias/parle.

DPR Kecewa MK Batalkan UU Perkoperasian

DPR mengaku kecewa atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Meski begitu, DPR menerima dan memahami pertimbangan putusan MK tersebut.

“Komisi VI DPR kecewa terhadap pembatalan secara menyeluruh UU Perkoperasian No 17 tahun 2012, karena kan yang digugat itu cuma tiga pasal tapi semuanya dibatalkan. Tapi, sebagai warga negara yang baik tentunya kami akan menerima dan berusaha untuk memahami pertimbangan MK itu,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana (Fraksi Hanura) kepada Parlemen, baru-baru ini di Gedung DPR, Jakarta.

Sebelumnya, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hakim menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Menurut Erik, pada saat pandangan akhir fraksi pada pengambilan keputusan pengesahan UU Perkoperasian dalam rapat paripurna, Fraksi Partai Hanura, kata dia, sudah menyatakan bahwa fraksinya tidak puas terhadap

proses pembahasan UU Perkoperasian yang merupakan UU inisiatif dari pemerintah.

“Draf UU yang diajukan pemerintah pada saat itu menurut kami menunjukkan ketidaksiapan dan pemahaman yang kurang dari pemerintah terhadap permasalahan yang mendasar dari koperasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Misalnya saja, kata Erik, di dalam UU itu lebih banyak mengatur tentang koperasi simpan pinjam, padahal koperasi itu, sesuai dengan amanat dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945, adalah perwujudan dari usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut dia, seharusnya UU Koperasi itu lebih menekankan kepada konsep kepemilikan dan integrasi usaha yang dalam bahasa UUD 1945 adalah merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sehingga tekanannya mestinya selain pada konsep kepemilikan juga kepada sektor-sektor yang produktif.

“Kalau koperasi simpan pinjam itu tidak melulu produktif, karena di dalam komponen simpan pinjam pasti ada pembiayaan yang bersifat konsumtif, padahal koperasi itu harus sebagai wadah orang untuk mengakses pada kepemilikan usaha secara bersama pada sektor-sektor yang produktif sehingga bisa menumbuhkan dan menambah nilai tambah dan bisa mendorong proses produksi secara berkelanjutan dan akhirnya akan



Wakil Ketua Komisi VI DPR Erik Satrya Wardhana.

menimbulkan efek multiplier yang besar. Poin ini yang kami rasa kurang,” jelasnya.

Meski begitu, politisi dari Partai Hanura itu merasa UU Nomor 17 tahun 2012 ini sebetulnya masih bisa dipakai, Cuma memang, kata dia, harus ada pasal-pasal yang perlu diperbaiki. “Tapi kalau memang keputusan MK sudah seperti itu, maka menjadi tugas DPR bersama-sama pemerintah untuk segera memproses kembali UU Koperasi yang baru untuk menggantikan UU Koperasi yang lama,” katanya.

Dengan adanya putusan MK tersebut, secara otomatis acuan yang diikuti seluruh gerakan koperasi Indonesia tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Lili

Asjudiredja menyatakan keanehan-nya pada putusan MK tersebut. Sebab, hanya beberapa pasal yang dipermasalahkan, namun secara keseluruhan UU itu malah dibatalkan.

“Kalau menurut saya, MK ini mungkin tidak menguasai sepenuhnya soal koperasi, kemudian perwakilan dari seperti dari kementerian koperasi barangkali menjelaskannya kurang lengkap, sehingga kemudian juga dari kita, seharusnya juga komisi yang membi-

dangi itu dilibatkan untuk memberikan penjelasan, sehingga dengan demikian informasi itu akan lebih lengkap. Jangan yang datang kesana bukan orang yang tidak ikut di dalam pembahasan, jadinya susah. Akhirnya ya wajar saja MK memutuskan seperti itu,” katanya.

Terkait adanya beberapa pasal di dalam UU Perkoperasian yang dianggap mengusung semangat kapitalisme yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip koperasi sebagaimana alasan yang

digunakan penggugat UU Perkoperasian di MK, menurut Lili, prinsipnya koperasi tetap sekumpulan orang untuk mendirikan suatu wadah usaha.

Oleh karena itu, kata Lili, harus diberikan penjelasan dan yang bisa memberikan penjelasan itu menurut dia adalah pihak kementerian koperasi. “Apalagi draft UU ini kan dari pemerintah. Intinya dari Kementerian Koperasi kurang bisa memberikan penjelasan secara tuntas,” jelasnya. (nt) foto: odjie/parle/hr.

DPR: Negara Jangan Kalah Dengan Pelaku Kekerasan Agama

Aksi kekerasan bernuansa agama yang terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menimpa sejumlah warga pada saat beribadah mendapat perhatian yang serius dari DPR.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Gde Sumarjaya Linggih berharap cita-cita kemerdekaan yakni persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi harmonisasi kehidupan bangsa tidak terpecah belah.

“Saya berharap semua elemen bangsa mengingat apa yang telah diingatkan dari *founding fathers* soal kebhinnekaan, yang begitu berarti bagi kepentingan bangsa dan negara ini,” kata Gde Sumarjaya Linggih kepada Parlemen, baru-baru ini di Gedung DPR, Jakarta.

Ia mengatakan semangat Pancasila yang mengajarkan toleransi perbedaan harus dimaknai seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, semua kelompok yang berbeda paham dan keyakinan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memelihara harmoni sosial.

“Jangan sampai hanya sebagian kecil yang ngotot, sebagian kecil yang melakukan kekerasan kemudian negara kalah, kemudian tujuan bersama yang kita cita-citakan bersama akhirnya mandek ataupun lepas dari tujuan yang diharapkan,” katanya.



Anggota Komisi VIII DPR Gde Sumarjaya Linggih.

Saat ditanya sering terjadinya kasus kekerasan bernuansa agama, apakah pemerintah dianggap lalai dalam memberikan jaminan kepada masyarakat untuk melakukan ibadah, menurut Gde Sumarjaya Linggih, disitulah tantangannya saat ini bagi pemerintah.

“Kalau ini tidak mampu menyelesaikan berarti negara dianggap gagal, tetapi selama masih bisa diselesaikan dengan baik tentunya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan sejalan dengan apa yang telah diingatkan oleh *founding fathers* terdahulu,” jelasnya. (nt) foto: andry/parle/hr.

Komisi V DPR Setujui Panja Pencarian dan Pertolongan

Komisi V DPR menyetujui pembentukan Panja Pencarian dan Pertolongan (Panja PP) guna memperdalam RUU DIM PP tersebut. Demikian salah satu butir kesimpulan Komisi V DPR

saat Raker dengan Menteri Perhubungan EE.Mangindaan, Kepala Basarnas, di Gedung Nusantara II, Kamis, (5/6).

“Raker telah menyepakati DIM yang ada usulan perubahan atau rumusan redaksional dan meminta penjelasan 222 DIM diserahkan kepada Panja untuk mendalami dan membahas lebih



lanjut dengan rincian sebagai berikut, yaitu DIM perubahan substansi atau rumusan berjumlah 117 DIM, DIM perubahan redaksional 56 DIM dan DIM meminta penjelasan 19 DIM,” jelas Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena saat membacakan salah satu butir kesimpulan dihadapan Raker tersebut.

Menurut Michael, Panja pembahasan RUU tentang Pencarian dan Pertolongan yang susunannya diharapkan dapat menuntaskan pada masa persidangan I tahun sidang 2014-2015 pada akhir bulan Agustus atau pertengahan bulan September 2014.

Anggota DPR dari Fraksi PKS Abdul Hakim mengusulkan, DIM meminta penjelasan agar tidak dibahas dalam rapat kerja akan tetapi dibahas dalam Panitia Kerja (Panja). Sementara, khusus DIM perubahan Redaksional itu tidak perlu dibawa ke Panja akan lebih baik dibahas di Tim Perumusan (Timus) sehingga meringankan kerja Panja” ujar Abdul Hakim.



Suasana rapat Panja RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

Anggota DPR Mulyadi (Fraksi Demokrat) menyoroti proses legislasi antara Eksekutif dan legislatif. Pasalnya belum lama ini UU Koperasi telah dibatalkan.

“Kami mengharapkan Menkumham lebih serius dalam mensinkronisasi UU

lainnya. Pasalnya, banyak kritik pakar hukum yang dibuat tumpang tindih dan tidak jeli sinkronisasinya dengan yang lain. Jadi kita mengharapkan tidak hanya kuantitas tetapi kualitas juga semakin meningkat,” ujarnya. (Sugeng Irianto/br)/foto:andri/parle/iw.

KPPU Minta Dukungan Komisi VI Perjuangkan Anggaran

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2014 rencananya akan dipotong oleh pemerintah. Pemotongan anggaran ini kian membuat KPPU tak berdaya melakukan kerja pengawasan. Apalagi, masih ada 12 perkara sengketa usaha yang sedang diperiksa. Bila, anggaran jadi dipotong, KPPU tak bisa melanjutkan pemeriksaan 12 perkara tersebut.

Ketua KPPU M. Nawir Messi meminta dukungan tersebut saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (4/6). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya (F-PD) didampingi Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto (F-PG). Nawir berharap Komisi VI dapat memperjuangkan anggaran KPPU agar tidak dipotong dalam pembahasan anggaran di Banggar DPR.

Komisi VI mengapresiasi serapan anggaran KPPU selama ini. Untuk itu, sebagai mitra kerja, Komisi VI akan memperjuangkannya agar tidak ada pemotongan anggaran. KPPU adalah lembaga strategis untuk mengawasi sengketa usaha dan praktik monopoli. Apalagi, kini KPPU mendapat tambahan tugas baru, yaitu mengawasi pelaksanaan kemitraan pelaku usaha besar dengan usaha kecil. Idealnya, ini harus mendapat tambahan anggaran, bukan justru dipotong.



Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijaya.

Selain itu, KPPU harus mempersiapkan perangkat regulasi dan SDM untuk menghadapi implementasi *Asean Economic Community* 2015. Ini semakin membebani KPPU dengan anggaran yang sangat minim. Azam juga mensinyalir, selama ini mitra kerja Komisi VI mendapat alokasi anggaran yang minim. Padahal, kerjanya begitu besar dalam menciptakan keseimbangan. (mh)/foto:andri/parle/iw.

Komisi IX Temukan Banyak Persoalan Pelaksanaan BPJS

Komisi IX DPR RI konsen terhadap pelaksanaan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Komisi yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja ini masih menemukan banyak permasalahan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

Saat melakukan kunjungan Komisi IX di Provinsi Jambi, Senin (2/6), sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi dan persiapan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2015.

Pengawasan tersebut terkait kebijakan di bidang ketenagakerjaan termasuk kesiapan BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP) mengatakan bahwa Komisi IX akan menindaklanjuti temuan ini, dengan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja dan Asosiasi Rumah Sakit, IDI terkait masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan BPJS.

Menurut Irgan, ada persoalan sosialisasi tentang BPJS kepada masyarakat dan pemangku kepentingan seperti rumah sakit, dokter, Pemprov, peserta. "Jangan dikarenakan kurang koordinasi menyebabkan pelayanan kurang optimal," katanya.

Selain itu, dana yang diberikan untuk fasilitas kese-



Tim Komisi IX DPR saat melakukan kunjungan ke Jambi.

hatan khususnya puskesmas masuk mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkadang lama sekali dinamika yang terjadi di DPRD. Dikatakan Irgan, apalagi ini dianggap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga menjadi repot, seharusnya ini menjadi bagian yang terpisah.

"Ini harus *top-down* langsung ke BPJS karena untuk instan diberikan kepada pelayanan. Uang yang diberikan untuk pelayanan dapat langsung ke masyarakat," ungkapnya. Lebih lanjut, sistem pelayanan rujukan perlu dapat lebih fleksibel karena menyangkut nyawa manusia, persoalan kualitas, dan kelengkapan medis. (as) foto: iwan armanias/parle/hr.

Anggaran Dipotong, KY Bisa Mati Suri

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan, Komisi Yudisial (KY) merasa keberatan atas pemotongan anggaran sebesar 27%. Pasalnya, konsekuensi dari pemotongan tersebut cukup berat sebab tugas seperti seleksi hakim agung dan pemeriksaan kode etik para hakim tidak bisa terlaksana atau gagal.

Hal itu dikemukakannya se usai menerima kunjungan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan beberapa anggota serta Sekjen KY di Gedung DPR, Kamis (5/6).

Priyo yang didampingi Wakil Ketua Komisi III DPR Al-Muzzammil Yusuf serta Sekjen DPR Winantuningtyastiti selanjutnya mengatakan, atas hal



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

tersebut, Pimpinan DPR memberikan disposisi kepada Komisi III DPR sebagai mitra kerja KY termasuk masalah perekrutan calon hakim agung yang disampaikan ke DPR. "Bilamana KY-

mengajukan 10 calon, maka DPR akan menerima seluruhnya atau menolak, atau sebagian diterima atau sebagian ditolak," katanya.

Mengenai pemotongan anggaran KY tersebut, menurut Priyo diputuskan secara sepihak oleh Presiden. Presiden memang mempunyai hak untuk melakukan pemotongan itu, tetapi belum menjadi keputusan final karena DPR punya hak untuk menolak atau menerima, karena anggaran dalam APBN diputuskan oleh DPR dan Pemerintah.

Karena itu sambung Priyo, kalau dalam proses di Komisi III dan menyatakan keberatan, Presiden juga harus membuka peluang untuk lem-



baga atau badan-badan negara yang plafon dananya kecil itu, jangan secara sepihak dipotong. “Kalau anggaran institusinya besar dan kebocoran hingga triliunan rupiah, silahkan saja dipotong,” tegas dia.

Dikatakannya, anggaran untuk KY tidak mencapai 1 triliun, kalau dipotong kasihan juga. Dampak pemotongan ini, kata Priyo, KY bisa mati suri-mati-

sekan hidup mati tak mau. Dikhawatirkan tugas-tugas menjaring calon-calon hakim, pemeriksaan hakim, kode etik, menyiapkan *fit and proper test* calon hakim agung, bisa berantakan semua.

“Kita minta Menteri Keuangan bisa mempertimbangkan itu semua,” ungkapnya dengan menambahkan bahwa pemotongannya sekitar Rp 22 miliar. APBN 2014 yang jumlahnya mencapai

Rp 1.700 triliun lebih itu plafon untuk KY itu kecil, tetapi sebaliknya untuk KY besar sekali.

Mengenai sikap DPR atas masalah ini, Priyo mengatakan setuju untuk ikut mendudukkan masalah ini dan membahas bersama-sama dengan Menteri Keuangan. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

Pleno Baleg DPR Tunda Pengesahan RUU Pertembakauan

Rapat Pleno Badan Legislatif (Baleg) DPR, Rabu (4/6) dengan agenda Laporan Panja dilanjutkan pengambilan keputusan terhadap RUU Pertembakauan dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono menunda pengesahan RUU Pertembakauan.

“Dengan banyaknya tanggapan yang disampaikan terhadap laporan Panja Pertembakauan, menurut kami perlu dipertimbangkan untuk melakukan satu kali lagi pendalaman terhadap draft RUU Pertembakauan,” kata Mulyono.

Mulyono menyatakan draft RUU yang sudah dibuat sedemikian luar biasa oleh Ketua Panja dan Anggota Panja Pertembakauan ini masih ada celah-celah yang sebetulnya masih ada kesempatan untuk diperbaiki.

“Kita mundur satu langkah agar bisa melangkah sepuluh langkah, kami mohon seluruh anggota Panja Pertem-



Ketua Baleg, Ignatius Mulyono.

bakauan bisa hadir dalam Rapat Panja yang akan diselenggarakan Senin depan (9/6),” tegas politikus Fraksi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama setelah Ketua Panja Pertembakauan yang juga Wakil Ketua Baleg, Sunardi Ayub menyampaikan laporannya, seluruh fraksi-fraksi yang hadir meminta untuk menunda pengambilan keputusan terhadap

RUU Pertembakauan. Pasalnya masih banyak hal bersifat substantif perlu pembahasan lebih mendalam.

Seperti disampaikan Anggota Baleg dari F-PP, Zainut Tauhid Sa’adi. Menurutnya pada rapat pleno baleg terakhir masih ada beberapa pendapat-pendapat substantif yang masih belum didiskusikan dan belum dimasukkan dalam draft RUU. Antara lain seperti tata wajib didalam pasal 18, 19 dan 20 harusnya disertai dengan ketentuan pidana, tetapi didalam draft RUU Pertembakauan ini tidak ada ketentuan pidana yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut.

Senada dengan Zainut Tauhid, Anggota Baleg Buchori menyatakan Panja belum melakukan sinkronisasi pasal demi pasal draft RUU Pertembakauan. Pasalnya pada saat rapat pleno terakhir diputuskan akan dilakukan pada rapat pleno berikutnya. (sc)/foto:iwan armanias/parle.

Pelatihan Etika dan Moral Sangat Diperlukan Bagi PNS Setjen DPR

Kegiatan *Benchmarking* Pengelolaan PNS Setjen DPR RI saat Kunjungan studi banding PNS Parlemen ke Republik Rakyat Tiongkok telah menghasilkan tiga kesimpulan dan empat saran bagi Setjen DPR RI.

“Kita perlu mencontoh dengan pemberian pelatihan etika dan moral bagi para Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan loyalitas kepada negara dan masyarakat serta rasa tanggung jawab dan kejujuran,” ujar Ketua Delegasi Kegiatan *Benchmarking* pengelolaan PNS ke Parlemen RRT Helmizar dalam laporannya yang dikirim ke Parleментарia,

Rabu, (4/6).

Menurutnya, dengan pelatihan etika dapat membantu untuk mencegah korupsi, meningkatkan disiplin dan meningkatkan kepercayaan publik kepada para pegawai negeri. Dan akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh para pegawai negeri sipil kepada masyarakat.

Dia mengatakan, pelaksanaan penilaian terhadap setiap pegawai diperlukan untuk mengetahui kompetensi dan ke-



Ketua Delegasi Kegiatan Benchmarking pengelolaan PNS Helmizar saat berkunjung ke Parlemen RRT.

terampilan guna penempatan yang bersangkutan pada unit kerja yang sesuai dan ketepatan dalam pemberian nama jabatan dan tingkat jabatan (kelas jabatan). “Kita juga perlu melaksanakan sosialisasi tentang kedisiplinan dan moralitas sebagai unsur yang penting dalam pembinaan pegawai untuk dipertimbangkan dalam promosi,” ujar Kepala Biro Persidangan Setjen DPR RI ini.

Disisi lain, lanjutnya, perlu adanya pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas karena loyal kepada organisasi. Saat Kunjungan ke RRT, tim menemukan bahwa pembinaan pegawai yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Republik Rakyat Tiongkok telah dilakukan bahkan terus ditingkatkan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi untuk menjamin kesejahteraan pegawai itu sendiri, meningkatkan kinerja sehingga tugas dapat dilaksanakan dengan baik, dan juga memupuk loyalitas kepada negara dan rakyat.

Terkait pembinaan pegawai di RRT, telah dilakukan dari mulai rekrutmen, pengangkatan, promosi, kedisiplinan, pensiun, dan pengupahan dilakukan secara terbuka dan adil. “Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada publik maka setiap pegawai negeri di RRT dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengawasan terhadap kedisiplinan,” katanya.

Di RRT, lanjutnya, terdapat penghargaan yang diterima oleh pegawai negeri berdasarkan pada aspek moralitas, kompetensi, dan keterampilan kerja disamping juga loyalitas untuk bekerja pada daerah yang terbelakang. (si) foto: helmizar/parle/hr.

Komisi IX DPR Dukung Jateng Jadi Kota Percontohan BPJS

Ketua tim Komisi IX DPR RI Supriyatno sekaligus Wakil Ketua Komisi IX mengatakan, kunjungan ke Semarang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan jaminan sosial dan jaminan kesehatan yang ada di kota tersebut.

Pihaknya juga mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai pembayaran klaim dan pengelolaan dana kapitasi BPJS.

Dirinya menyambut baik animo masyarakat Jawa Tengah yang terhitung tinggi terhadap kepesertaan BPJS, yakni mencapai 54 persen. Diharapkan provinsi ini bisa menjadi percontohan pelaksanaan BPJS di Indonesia. “Kita mendukung penuh bila Jateng menjadi kota percontohan BPJS tingkat nasional,” jelasnya saat Kunker tersebut.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Pungky Samhasto mengatakan, berdasarkan evaluasi, JKN yang dikelola BPJS melalui puskesmas, klinik, dan dokter keluarga, tidak menjumpai masalah, khususnya dari aspek pelayanan kesehatan.

“Masalah muncul saat ada dana kapitasi tapi belum ada regulasi pemanfaatannya. Namun mulai 1 Mei peraturan tentang proses pemanfaatan dana kapitasi di kabupaten/kota sudah bisa digunakan,” jelasnya.

Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional VI Andayani Budi Lestari mengungkapkan sampai saat ini sudah terdapat 19.591.666 peserta BPJS Kesehatan. Jumlah tersebut mencapai 54,7 persen dari jumlah penduduk Jawa Tengah yang tercatat 35,8 juta orang.



Tim Komisi IX kunjungi Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang.

Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengharapkan pelayanan BPJS tidak menggunakan sistem yang rumit. Sehingga masyarakat mudah menyampaikan klaim BPJS. “Apalagi sekarang ini masih ada sejumlah pertanyaan dari beberapa kabupaten, menyangkut kapan dana klaim dapat dicairkan, dan seperti apa polanya,” ujarnya.

Tidak hanya itu, jelasnya, pada pelaksanaannya masih ada masyarakat yang mengeluhkan mengenai BPJS. Misalnya kalangan buruh yang menyoal mengenai perubahan Jam-sostek menjadi BPJS yang berdampak pada munculnya tam-

bahan biaya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu dianggap cukup memberatkan dan mempengaruhi psikologi buruh.

“Mudah-mudahan kita bisa cari solusinya. Minimal komitmen antar penyelenggara bisa terjalin dengan pelayanan

yang baik. Problem komunikasi menjadi penting. Saya juga ucapkan terima kasih kepada rumah sakit yang sudah membantu pelaksanaannya. BPJS Jateng akan didorong menjadi model percontohan dalam hal pelaksanaan JKN dan BPJS yang baik,” katanya. (Sugeng Irianto) Foto: Sugeng/parle/hr.

Komisi IV Minta Perum Bulog Tingkatkan Kualitas Raskin

Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, berkaitan dengan banyaknya masukan atas kualitas beras untuk rakyat miskin (raskin). Komisi bidang pangan DPR RI meminta kepada Bulog untuk meningkatkan kualitas raskin yang disalurkan kepada masyarakat.

“Komisi IV meminta kepada Bulog untuk merumuskan konsep mengenai perbaikan sistem dan mekanisme penyaluran raskin,” ujar Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron baru-baru ini, di Gedung Parlemen, Jakarta.

Menurut Herman Khaeron, program bantuan raskin sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, karena raskin selain memberikan kontribusi besar terhadap ketersediaan pangan khususnya beras, juga dapat menekan tingkat harga.

“Ada 2 misi sekaligus raskin ini memberikan manfaat. Bagi yang menerima akan lebih manfaat lagi karena mendapatkan subsidi yang begitu besar,” katanya.

Masyarakat hanya membeli seharga Rp.1.600 ditambah ongkos transportasi dari titik distribusi ke titik bagi. Namun Komisi IV banyak menerima pesan moral dari masyarakat supaya kualitas raskin ini betul-betul kualitas yang baik.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron.

Selain itu, ada hal yang Komisi IV rekomendasikan untuk segera dibuatnya konsepsi baru, yaitu konsep yang baik dan benar agar raskin selain memberikan manfaat pada penerima raskin dengan subsidi yang begitu besar.

“Negara mengeluarkan hampir Rp18 triliun lebih untuk subsidi raskin, dan tentunya dapat diterima dengan jumlah dan durasi waktu yang diterima,” paparnya.

Terkait tujuan agar raskin tepat sasaran, kata Herman, Ini justru yang harus diselesaikan. Selama lima tahun berada di Komisi IV yang selalu men-

jadi perosoalan yaitu masalah tepat sasaran, tepat harga dan tepat kualitas.

“Ini sudah ada perbaikan, tapi di beberapa daerah masih harus diperbaiki. Untuk itu kami tidak akan berhenti memperjuangkan berbagai aspirasi rakyat termasuk raskin ini agar diterima dengan baik. Baik tepat waktu, tepat kualitas dan tepat harga,” katanya.

Ketersediaan Beras

Menurut Herman Khaeron, ketersediaan beras menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, masih cukup. Sampai saat ini stok Bulog masih mencukupi, masih ada 1,8 juta ton. Kalau hasil panen atau hasil produksi nanti memang sesuai dengan target pemerintah (Kementerian Pertanian) 76 juta ton gabah kering panen, diperkirakan tidak akan ada impor.

“Akan tetapi kalau turun dari itu, dan kemudian prospek ke depannya pada tahun 2015 nanti akan bisa tercapai hasil yang memadai, saya kira mungkin akan terhindar dari impor,” katanya.

Selama tahun ini, Herman Khaeron memperkirakan masih surplus dan prospek tahun depan masih baik. Dengan stok 1,8 juta ton ditambah masa panen serta diprediksi iklim memungkinkan untuk menaikkan produksi, maka tidak perlu impor. (as) foto: andry/parle/hr.

Rusia Minta Dukungan Indonesia Soal Konflik Ukraina

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah memancing banyak negara di kawasan Eropa untuk ikut campur urusan dalam negeri suatu negara. Prinsip-prinsip kedaulatan banyak dilanggar. Rusia minta dukungan Indonesia lewat DPR untuk ikut menyuarkan perdamaian dan saling

menghormati kedaulatan.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin, Kamis (5/6) di DPR. Galuzin

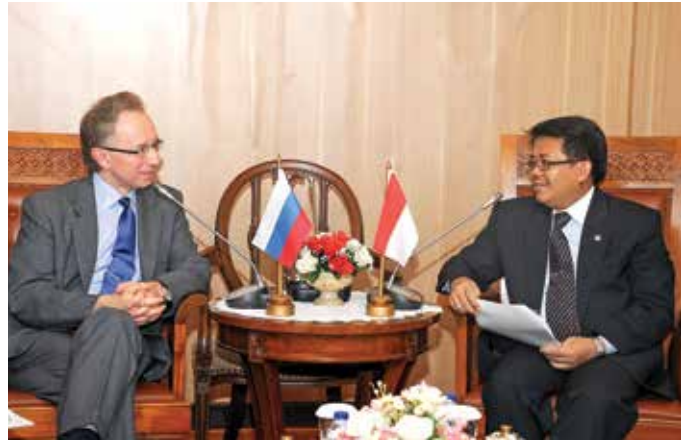
mengemukakan, negara-negara Barat yang dipimpin Amerika telah mendukung kudeta konstitusional yang terjadi di Ukraina. Ini jadi preseden buruk bagi hubungan politik antarnegara di dunia. Kudeta ini telah memunculkan ketegangan hubungan dengan Rusia, terutama di daerah-daerah perbatasan.

“Campur tangan negara Barat dalam urusan dalam negeri suatu negara merupakan pelanggaran yang sangat kasar atas kedaulatan negara,” tandas Galuzin.

Menanggapi pernyataan Galuzin tersebut, Sohibul Iman menyatakan, sangat menghargai upaya Rusia dalam menjaga kedaulatan negara-negara merdeka. “Indonesia punya pandangan yang sama dengan Rusia soal kemerdekaan suatu bangsa seperti yang tertuang dalam konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa.

Ditegaskan Sohibul, Indonesia termasuk negara yang tidak menginginkan adanya hegemoni negara-negara besar atas negara lain. Untuk itu, negara-negara maju perlu menghormati prinsip kedaulatan yang sangat fundamental ini. Kasus penggulingan pemimpin suatu negara sering terjadi dan Amerika biasanya berperan aktif dalam mendukung penggulingan tersebut. Contoh konkrit adalah kasus Irak, Mesir, Libya, dan lain-lain, dimana Amerika ikut mendukung penggulingan.

Dikatakan Sohibul, kudeta memang selalu membawa dampak yang panjang. Hak-hak dasar rakyat sering tersandera di masa kudeta berlangsung. Di hadapan Sohibul, Galuzin juga mengungkapkan, banyak rakyat Ukraina yang tinggal di perbatasan dengan Rusia mengalami penindasan dari pemerintah transisi di Ukraina. Banyak rakyat Ukraina di perbatasan yang berbahasa Rusia. Oleh pemerintahan



Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman menerima Dubes Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin.

transisi Ukraina dipaksa menghilangkan bahasa Rusia dan harus berbahasa Ukraina.

Bahkan, menurut Galuzin, 50% penduduk Ukraina berbahasa Rusia dan memiliki ras Rusia. Kini, pemerintah Ukraina sedang memerangi penduduknya sendiri di wilayah timur dan selatan Ukraina. Di Kremia, penduduknya menuntut referendum untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Menurut Sohibul, menghapus bahasa ibu yang sudah turun temurun merupakan pelanggaran HAM. Pihaknya mengaku akan mempelajari lebih dalam dokumen yang diberikan Dubes Rusia menyangkut perkembangan mutakhir konflik Rusia dan Ukraina. Bahkan, ia siap hadir dalam pertemuan *Economic Summit* di Rusia pada 26 Juni mendatang sesuai undangan yang disampaikan Dubes Rusia. (mh) foto: iwan armanias/parle/hr.

Aparat Penegak Hukum Diminta Segera Tuntaskan Kasus Sleman

Wakil Ketua Komisi III DPR Al-Muzzammil Yusuf meminta aparat penegak hukum perlu segera menuntaskan kasus penyerangan berlatar belakang agama, sebagaimana terjadi Sleman baru-baru ini. Hal-hal seperti ini harus dihindari dan dijaui, apalagi menjelang pemilu presiden (pilpres).

Ditemui Parlemen sebelum menghadiri Sidang Paripurna DPR Selasa (3/6) siang, Pimpinan Komisi yang membidangi masalah hukum ini mengatakan, momen pilpres bukan untuk memperlihatkan tindakan kekerasan seperti itu, melainkan untuk memilih pemimpin nasional secara sportif. Siapapun yang menang atau kalah adalah hal biasa dalam sebuah



Wakil Ketua Komisi III DPR Al-Muzzammil Yusuf.

kompetisi. Sebagaimana pemilu legislatif April lalu, ada yang kalah dan ada juga yang menang.

“Saya sangat menyayangkan sekali kenapa kasus intoleransi masih terjadi. Sekali lagi saya menghimbau aparat penegak hukum untuk segera bertindak sesuai dengan aturan yang ada,” ujar politisi PKS ini. Ia menegaskan, sebagai negara hukum antar pemeluk agama harus saling menghormati dan kebebasan beribadah dijamin oleh negara.

Hal yang sama disampaikan anggota Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, sesuai konstitusi kekerasan berlatar belakang agama seharusnya tidak terjadi lagi di negara kita. Apapun alasannya kekerasan atas nama agama tidak dibenarkan sebab negara menjamin setiap warga negara punya kebebasan untuk

memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.

Seharusnya penegak hukum segera bertindak sebab sudah melewati batas aturan yang ditetapkan bersama. "Aparat kepolisian segera menangkap siapa pelaku kekerasan tersebut," tegasnya.

Soal keterlibatan tokoh-tokoh agama

mencegah kekerasan tersebut, ia mengatakan dialog antara tokoh-tokoh agama sudah sering dilakukan. Justru yang ditunggu adalah tindakan tegas aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk mengungkap siapa aktor dibalik penyerangan tersebut dan segera tangkap siapa pelakunya.

la berharap Forum Kerukunan antar Umat Beragama berperan secara

efektif sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Ditegaskan Syadzily, kasus di Sleman tersebut sudah merupakan tindakan kriminal sehingga peran penegak hukum harus tegas. "Tidak perlu ada toleransi lagi terhadap pelaku intoleransi, apalagi menyerang seseorang yang sedang beribadah," ia menandaskan. (mp), foto : naefurodjie/parle/hr.

Komisi VI Tolak Pemotongan Anggaran KPPU



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijaya.

Komisi VI menolak rencana pemotongan anggaran 2014 untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggaran KPPU untuk tahun 2014 sudah kecil. Ironis, bila harus dipotong lagi.

Azam Azman Natawijaya (F-PD) yang memimpin rapat menyatakan menolak pemotongan anggaran KPPU 2014 saat rapat dengar pendapat, Rabu (5/6). "KPPU merupakan sebuah lembaga yang kecil. Jika dilakukan pemotongan bisa menyebabkan kinerjanya lemah," kata Azam.

Anggaran KPPU tahun 2014 sebesar Rp94 miliar. Rencana pemotongan sebesar Rp25 miliar. Ketua KPPU M. Nasir

Messi menyatakan, anggaran KPPU sudah terlalu minim sehingga sulit dilakukan penghematan. KPPU meminta format ulang dengan merestrukturisasi dan melakukan reorganisasi agar fokus melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bila upaya pemotongan jadi terlaksana, komisioner KPPU menyatakan tak mau terlibat dalam pembahasan anggaran pemotongan tersebut di Komisi VI. Pemotongan tersebut akan berdampak pada pencapaian target dan kegiatan prioritas di KPPU. Dalam kesimpulan akhirnya yang dibacakan Azam, secara eksplisit menolak pemotongan. Bahkan, Komisi VI mengusulkan untuk anggaran 2015, KPPU diharapkan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 64.114.108.707.

Para anggota Komisi VI juga menyayangkan usulan pemotongan anggaran tersebut. KPPU lembaga kecil, sehingga kurang mendapat perhatian pemerintah. Lembaga kecil cenderung menjadi korban pemotongan anggaran. Komisi VI berupaya memperjuangkan anggaran KPPU tersebut di Banggar DPR.

Anggota Komisi VI Iskandar Syaichu (F-PAN) yang sekaligus anggota Banggar, mengungkapkan, pemotongan anggaran belum disepakati. "Pemotongan Rp25 miliar merusak roh KPPU. Ini akan diperjuangkan, agar tidak mengganggu kinerja. Kalau pun pemotongan harus dilakukan, KPPU diharapkan tidak membuat kondisi usaha ke depan menjadi mandek." (mh,zah)/foto:andri/parle/iw.

DPR Segera Tuntaskan RUU JPH

DPR segera menuntaskan RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini tinggal menunggu kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Kesepakatan yang akan dicapai antara DPR dan Pemerintah adalah mengenai proses sertifikasi halal antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu disampaikan anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Jaminan Produk Halal (JPH) Raihan Iskandar (FPKS) dalam acara diskusi Forum Legislasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/6). Selain Raihan Iskandar, hadir pula Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim dan Pengurus Harian YLKI TulusAbadi.

Menurut Raihan Iskandar, MUI ingin

tetap sebagai pemberi fatwa haram (substantif), tapi Kemenag ingin administratif dan substantif di bawah pemerintah. "Ketidaksepakatan kedua kewenangan itu kalau nanti tetap buntu, maka akan divoting. Karena itu, mestinya pembahasan di pemerintah tentang kedua kewenangan itu selesai terlebih dahulu sebelum dibahas di DPR, dan DPR tetap menghargai



Anggota Panja RUU Jaminan Produk Halal, Raihan Iskandar dalam diskusi Forum Legislasi.

proses sertifikasi halal MUI yang sudah berlangsung 25 tahun ini,” katanya.

Diakui Raihan, jika posisi MUI ini bukan pemerintah, bukan LSM, bukan juga BUMN. Tapi, keberadaannya dalam RUU JPH ini sangat dihargai sebagai pemberi fatwa halal. Oleh sebab itu dalam RUU JPH ini, masih terdapat dua alur proses sertifikasi halal, yaitu pemerintah dan MUI. “Kalau DPR yang penting dalam sertifikasi halal ini jangan sampai saling mengganggu antara MUI dan Kemenag” ujarnya.

Terkait sifat sertifikasi, Raihan menjelaskan DPR menawarkan sifatnya *mandatory* (wajib), sedangkan dari pemerintah sifatnya sukarela.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim menjelaskan kalau sertifikasinya bersifat sukarela maka tak berarti UU ini tidak ada relevansi dan kepentingannya karena sama saja dengan yang ada sekarang. Selain itu, tambahnya, berarti bukan untuk melindungi masyarakat.

Ia menambahkan, karena sifatnya yang sukarela maka selama 25 tahun MUI menjalankan sertifikasi halal masih banyak industri yang tak mendaftarkan sertifikasi halal. “Harusnya sifatnya *mandatory*. Kalau sukarela maka UU ini menjadi tak relevan. Yang utama itu perlindungan masyarakat maka sifat sertifikasinya harus *mandatory*,” katanya.

Meskipun demikian, Lukmanul menegaskan sifatnya

mandatory yang terstruktur dengan berbagai pertimbangan. Dijelaskan sekarang ini perdebatan yang ada hanya pada siapa yang berwenang memberikan sertifikasi.

Selain sertifikasi, penetapan lembaga pemberi fatwa halal, dan pengawasan oleh pemerintah juga dianggap penting oleh MUI. “Apa yang dilakukan oleh MUI selama 25 tahun ini akibat kekosongan UU, di mana selama ini pemerintah, negara memang tidak peduli terhadap perlindungan konsumen, sehingga banyak produk dalam negeri maupun luar negeri (impor), bebas sertifikasi halal dan jelas merugikan umat Islam,” ujarnya.

Karena itu lanjut Lukman, pembahasan RUU JPH ini menjadi tidak penting, kalau hanya menyangkut masalah otoritas - kewenangan, bukan asasi dari sertifikasi halal itu sendiri. Padahal, asasinya adalah perlindungan. Sangat mendesak konsumen diberi perlindungan.

Bukan hanya siapa melakukan apa? Untuk itulah MUI bersikukuh, karena sertifikasi ini terkait dua hal; yaitu substantif (fatwa halal MUI), dan administratif. Di mana untuk fatwa itu dibutuhkan orang yang kompeten, dan harus bebas dari intervensi politik siapapun,” ujarnya.

Sedangkan secara administratif menurut Lukman, terkait dengan pemeriksaan, pengawasan, standar halal, peredaran produk, standar produk halal, registrasi produk, dan sebagainya akan dilakukan oleh siapa? “Kalau fatwa halal bisa dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, Persis, dan ormas lainnya, ini justru bisa menimbulkan konflik dan kebingungan masyarakat, karena dipastikan akan terjadi perbedaan fatwa halal maupun haram. Jadi, MUI sebagai satu-satunya lembaga sertifikasi halal ini sebagai upaya untuk meminimalkan potensi konflik tersebut, dan di MUI terdiri dari para ulama dan kiai NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain ormas Islam,” pungkasnya.

Sementara itu Tulus Abadi menyatakan sepakat soal sifat sertifikasi, harus *mandatory*. “Tapi ini, *mandatory* harus bertahap. Kalau tidak akan jadi persoalan. Sudah siap belum infrastrukturnya,” katanya. Tulus mengingatkan jangan sampai niatnya melindungi masyarakat namun nanti sertifikasi halal justru akan menjadi beban industri kecil. (nt/sc), foto : andi/parle/hr.



Ketua Pansus RUU MD3, Benny K Harman.

Pansus MD3 Berencana Gabungkan Kesekjenan Tiga Parlemen

Panitia Khusus (Pansus) RUU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) berencana akan menyatukan kesekjenan di tiga lembaga parlemen tersebut. Hal tersebut terungkap dalam rapat Pansus RUU MD3 di gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/6).

“Kami ingin menggabungkan Kesekjenan Parlemen itu dalam satu atap untuk melayani tugas-tugas parlemen dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, baik MPR, DPR maupun DPD. Sehingga ke depannya bisa lebih efektif,” jelas Ketua Pansus RUU MD3,

Benny K Harman.

Ditambahkan politisi dari fraksi Demokrat, ia menyadari bahwa fungsi dan tugas dari ketiga lembaga tersebut berbeda. Namun dalam hal kesekjenan ketiga lembaga tersebut memiliki tugas yang sama, yaitu sebagai institusi pendukung fungsi Parlemen

atau dewan dalam menjalankan fungsi kedewanan.

“Tinggal dibagi tugasnya masing-masing, supaya ada sinkronisasi antar kesekjenan ketiga lembaga tersebut,” ungkap Benny kepada Parle.

Benny melanjutkan bahwa pihaknya

ingin mereformasi tata organisasi, manajemen dari keparlemen. Hal itu untuk menjamin fungsi-fungsi Parlemen ini bisa berjalan sebagai mana mestinya. Sementara untuk bentuk dari kesekjenan tersebut Benny mengatakan bahwa hal tersebut masih akan dibahas selanjutnya. (Ayu)/foto:odjie/parle/iw.

Parlemen Asia Perlu Definisi Ulang tentang Kemiskinan

M. Oheo Sinapoy anggota delegasi Indonesia dalam Sidang *Standing Committee on Economic Affairs Asian Parliamentary Assembly (APA)* mengusulkan perlu meninjau ulang definisi kemiskinan yang ada saat ini. Ia menilai pemahaman tentang miskin perlu dinilai dari konteks budaya masing-masing negara.

“Saya ingin mendorong parlemen anggota APA mendefinisikan ulang apa itu kemiskinan, apa itu kurang uang atau karena rumahnya tidak bagus atau apapun itu. Saya mencermati budaya kita punya ukuran kemiskinan sendiri-sendiri,” katanya saat mengikuti rapat Komite Tetap di Sasono Mulyo Hotel LeMeridien, Jakarta, Rabu (4/6/14).

Menurutnya warga yang miskin belum tentu karena tidak punya uang tetapi mereka miskin karena minimnya akses terhadap pendidikan atau bisa jadi jauh akses kesehatan sehingga sering sakit dan tidak dapat bekerja.



Anggota delegasi Indonesia M. Oheo Sinapoy.

Masyarakat di Papua misalnya tinggal di Honai, rumah tanpa keramik belum tentu masuk kategori miskin.

Anggota delegasi Indonesia Evita Nursanty mendukung usulan ini. “Saya rasa usulan itu baik selama ini kita terpaku dengan standar kemiskinan yang ditetapkan dengan parameter barat bukan Asia,” paparnya.

Apabila APA dapat mengoreksi definisi kemiskinan itu maka jumlah penduduk miskin yang menurut Bank Dunia mencapai 900 juta jiwa akan dapat dikoreksi. Kondisi ini jelas meningkatkan nilai dan produktifitas kawasan.

Asisten Sekjen APA Ali Khorram menjelaskan usulan delegasi Indonesia tersebut belum dapat ditindaklanjuti dalam draf resolusi terkait kemiskinan yang sudah dipersiapkan. Usulan tersebut menurutnya akan dicatat dan disampaikan dalam rapat selanjutnya untuk dapat diakomodir dalam teks.

Sebelumnya *Country Director Asian Development Bank* untuk Indonesia Adrian Ruthenberg juga menyampaikan laporan angka kemiskinan Asia untuk kategori pendapatan 1,25 dollar AS per kapita per hari berhasil diturunkan. Namun perbaikan kemiskinan sejak antara tahun 2002 - 2010 sangat lambat. (iky)/foto:eka hindra/parle.

KPPU Baik, Daya Beli Masyarakat Membaik

Peran strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dipandang sangat penting, sama pentingnya dengan peran KPK. Hanya saja gaungnya tak sekuat KPK. Untuk itulah, KPPU harus diberdayakan lagi dengan memberi pagu anggaran yang memadai untuk bekerja. Bila KPPU baik, maka daya beli masyarakat pun ikut membaik.

“Kalau KPPU berfungsi dengan baik, kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena harga barang-barang jadi lebih murah,” kata Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno, Rabu (5/6), usai rapat dengar pendapat dengan KPPU. KPPU-lah yang menstabilkan harga akibat persaingan tidak sehat, sehingga daya beli masyarakat terus terjaga dengan baik.



Anggota Komisi VI DPR Hendrawan Supratikno.

Dijelaskan politisi PDI Perjuangan ini, di negara-negara maju, lembaga KPPU sangat disegani karena memiliki peran yang *power full*, hampir seperti KPK di Indonesia. “Sementara di Indonesia, KPPU masih dalam posisi yang lemah. Itu sebabnya, mereka ingin revisi UU. No.5/1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, agar mereka posisinya sama dengan lembaga lain di luar negeri,” jelas Hendrawan.

Selama ini, lanjut Hendrawan, KPPU bertanggung jawab menjamin efisiensi ekonomi nasional. Dalam praktik di lapangan, tak dipungkiri masih banyak distorsi ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha. Kolusi dan persekong-

kolan masih kerap ditemui untuk memonopoli atau memanipulasi pasar nasional, sehingga harga-harga melangit tak terjangkau masyarakat.

“Kesejahteraan masyarakat tergantung dari daya belinya. Kalau daya beli masyarakat digerogeti, praktik kolusi dan ketidakefisienan struktur pasar, luar biasa beban masyarakat. Kalau menurut penelitian ekonomi, rata-rata biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat karena praktik curang dalam bisnis kurang lebih 3-5% produk domestik bruto.”

Di tengah tuntutan agar KPPU berdaya mengawasi praktik usaha kotor,

pemerintah malah memotong pagu anggaran KPPU tahun 2014. Tren anggaran KPPU terus melorot dari tahun ke tahun. Bahkan, akan ada pemotongan lagi untuk anggaran 2014 ini. Seperti diketahui, tahun 2011 anggaran KPPU Rp181 miliar. Turun menjadi Rp119 miliar pada 2012. Sementara pada 2013 tetap sebesar Rp119 miliar. Dan turun tajam hingga 94 miliar pada 2014.

“Ini masih mau disunat lagi. Praktis seperti garuda yang bulu-bulu sayapnya satu per satu rontok,” keluh Hendrawan, mengakhiri wawancara. (mh),
foto :naefurodjie/parle/hr.

Pembangunan Rambu Suar di Tanjung Datu Bermasalah

Permasalahan pembangunan Rambu Suar di Tanjung Datu oleh Malaysia merupakan eksemplar dari berbagai permasalahan-permasalahan perbatasan yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Hal ini dapat dipahami karena menyelesaikan persoalan seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Demikian dikatakan anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, pada Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri di ruang rapat Komisi I DPR Gedung Nusantara II Jakarta, Selasa (3/6) sore.

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Tantowi mengemukakan, persoalan seperti ini pernah dialami Indonesia dengan Filipina hingga 20 tahun pun belum dapat terselesaikan. Dia mengatakan, permasalahan Tanjung Datu serta permasalahan yang lainnya itu merupakan sebuah PR kita bersama.

“Permasalahan perbatasan itu adalah permasalahan krusial yang dihadapi oleh Menteri Luar Negeri siapapun dia,” jelas Tantowi.

Politisi FPG ini juga menyinggung masalah peranan Asean dalam perkembangan isu Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salah satu kawasan dengan potensi konflik cukup tinggi, mengingat adanya klaim teritorial yang tumpang tindih dengan melibatkan negara anggota Asean.

Insiden di lapangan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, namun peranan Asean dalam geo politik terkesan hanya sebagai penonton saja.

Karena itu, lanjut Tantowi, sudah saatnya kita berbicara



Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya.

yang lebih keras kepada dunia tidak lagi berbicara sebagai market. “Kita harus berbicara sebagai pemain, karena kalau berbicara dengan isu inilah maka kita bisa bersanding dengan baik seperti Tiongkok dan dengan Jepang,” tambahnya.

Dikatakannya, Asean yang di dalamnya Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang diperhitungkan bukan saja dalam perspektif peluang bisnis dan ekonomi namun juga dalam perspektif ketahanan dan keamanan.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, terkait tindakan Malaysia tersebut, Kemlu telah menempuh langkah-langkah dengan menyampaikan protes langsung kepada Kepala Perwakilan Malaysia di Jakarta. Disamping itu juga menyampaikan nota protes kepada Kedutaan Besar Malaysia atas pemasangan tiang pancang rambu suar yang berada di sisi dalam wilayah landas Kontinen Indonesia.

Marty mengatakan telah mengeluarkan pernyataan pers yang pada intinya menyatakan keberatan atas kegiatan pembangunan tiang pancang rambu suar oleh Malaysia

yang dilakukan di dalam garis landas Kontinen Indonesia.

Terkait perkembangan terbaru di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia telah mengeluarkan Pernyataan Pers mengenai Isu Laut Tiongkok Selatan, dan menyampaikan kekhawatiran Indonesia terhadap “risiko yang nyata bagi eskalasi yang besar dan miscalculasi” di LTS.

Kemlu juga menyerukan kedua pihak (Vietnam dan RRT) untuk menahan diri dan menghormati komitmen internasional serta menghindari tindakan yang membahayakan kawasan. (Spy), foto : andri/parle/hr.

Pemerintahan Mendatang Harus Tingkatkan Produksi Pangan

Tren kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan lebaran, ternyata tidak saja terjadi di Indonesia. Pasar dunia pun mengalami lonjakan harga yang terus meningkat. Di tengah minimnya lahan dan kebutuhan yang terus meningkat, pemerintahan mendatang ditantang untuk meningkatkan produksi pangan.

“Secara umum di pasar dunia dari tahun ke tahun memang terjadi kecenderungan harga pangan meningkat. Terutama karbohidrat seperti tepung, jagung, dan beras. Itu kita lihat trennya sejak 20 tahun yang lalu, meningkatnya luar biasa,” ungkap anggota Komisi IV DPR Siswono Yudohusodo, sebelum rapat paripurna DPR, Selasa (3/6).

Menurut politisi Partai Golkar ini, bahan pangan berbasis karbohidrat seperti jagung, tepung, dan beras, tidak saja dibutuhkan oleh manusia, tapi juga untuk ternak dan kebutuhan energi seperti bio fuel. Jadi, wajar bila harga pangan di dalam negeri dan dunia meningkat. Konsumsi pangan akhir-akhir ini juga meningkat tajam dibanding beberapa tahun sebelumnya. Yang jadi persoalan krusial adalah nilai impor Indonesia terus meningkat dibanding ekspor.

“Pangan diperebutkan untuk 3 kepentingan, disamping manusia, seperti jagung diperebutkan juga untuk ternak. Manusia kini makan daging lebih banyak. Begitu pula ternak harus lebih banyak mengonsumsi pangan. Dan pangan juga diperebutkan untuk program energi dengan bio fuel,” jelas Siswono. Jadi sangat wajar konsumsi pangan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Selalu ada defisit perdagangan di sektor pangan karena ketimpangan impor yang terlalu tinggi daripada ekspor. Sementara produksi pangan juga tidak meningkat signifikan, karena areal lahan tidak diperluas. “Sawah-sawah berubah jadi industri, real estate, dan jalan. Jadi, sangat berbahaya masa depan kita untuk pangan. Kita tidak mampu membuka areal-areal pertanian yang baru di luar pulau Jawa,” keluh Siswono.

Ini jadi pekerjaan rumah untuk pemerintah baru yang akan datang. Produksi pangan harus ditingkatkan. “Jadi



Anggota Komisi IV DPR Siswono Yudohusodo.

tantangan pemerintahan akan datang adalah bagaimana meningkatkan produksi,” sambung Siswono. Sementara menyangkut inflasi, sektor pangan tertinggi menyumbang inflasi nasional. Semua ini lantaran pengeluaran terbesar hidup masyarakat adalah untuk kebutuhan pangan. Sehingga kenaikan harga pangan terus melejit.

Namun demikian, lanjut Siswono, menekan harga pangan supaya murah terus juga terasa tidak adil bagi para petani. Petani butuh harga tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Beras naik sedikit saja, langsung operasi pasar untuk menekan inflasi agar tidak tinggi. Sementara kebutuhan petani tidak diperhatikan, seperti transport naik, biaya sekolah naik, pupuk naik, benih naik, tapi berasnya enggak boleh naik. Itu juga enggak adil,” timpal Siswono. (mh), foto : naefurodjie/parle/hr.

DPR Harapkan Kasus Hukum Tak Ganggu Penyelenggaraan Haji 2014

Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah berharap kasus hukum dalam kasus korupsi dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji tidak mengganggu pelaksanaan ibadah haji tahun 2014. Hal tersebut diungkapkan Ida Fauziyah sesaat sebelum berlangsungnya Sidang Paripurna, Selasa (3/6).

Dikatakan Ida, pihaknya prihatin selangit kecewa akan adanya kasus korupsi pada proses penyelenggaraan perjalanan ibadah haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Belakangan, Dirjen Perjalanan Haji dan Umrah, Anggito Abimanyu juga mengajukan pengunduran dirinya kepada Menteri Agama Ad Interim, Agung Laksono.

Berkaitan tentang hal itu Ida mengatakan pihaknya belum mendengar langsung pengunduran diri Dirjen PHU tersebut. Ia hanya mengetahui informasi tersebut dari media massa. Ia berharap agar pengunduran diri Dirjen

PHU dan proses hukum dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK tidak akan mengganggu penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2014 ini.

“Saya berharap agar proses hukum yang sedang dijalankan terkait kasus korupsi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji tidak sampai mengganggu penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,” harap Ida.

Ia juga berharap agar Menteri Agama Ad Interim dan Dirjen PHU yang baru tetap dapat melanjutkan proses dan rencana penyelenggaraan ibadah haji 2014 ini. Sehingga hal tersebut tidak sampai merugikan umat dan masyarakat umum.

Sebagaimana dilansir dari berbagai media massa, Agung Laksono juga berharap, penyelenggaraan haji tahun ini tetap baik walaupun kementerian yang dipimpinnya sementara ini tengah mengalami persoalan.



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziyah.

“Pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenag harus dibangkitkan kembali untuk menghindari terjadinya demoralisasi. Mereka tetap harus bekerja keras, agar peristiwa itu tidak sampai menurunkan kualitas penyelenggaraan haji. Bahkan harus lebih baik,” ujar Agung. (Ayu) foto: andry/parle/hr.

Prajurit TNI yang Tidak Netral Bisa Dikenai Sanksi

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin menegaskan, setiap pelanggaran undang-undang harus dikenakan sanksi. Termasuk prajurit TNI yang tidak netral artinya berpihak pada salah satu capres atau menjadi Tim sukses, bisa dikenakan sanksi pemecatan.

“Dalam kaitan ini harus ada peran dari para komandan, dari komandan Brigade sampai dengan Panglima TNI. Ini mudah kok, asal ada perintah yang tegas bahwa siapa saja yang tidak netral, itu bisa dipecat. Cukup lewat Dewan Kehormatan,” tandasnya kepada pers, Selasa (3/6) sebelum Sidang Paripurna DPR.

Menurut pensiunan perwira TNI yang kini politisi PDI Perjuangan ini, pernyataan Presiden agar prajurit TNI tetap netral harus ditindak lanjuti.



Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin.

Imbauan Presiden itu tidak berlebihan, itu adalah kewajiban sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang dalam mengingatkan agar prajurit TNI selalu netral. “Biarlah pesta demokrasi ini

berjalan sebagaimana mestinya dan keterlibatan anggota TNI tidak diharapkan karena UU mengatur seperti itu,” ujarnya.

Saat didesak siapa saja yang terlibat dengan salah satu kandidat atau capres, ia mengelak menyebutnya. Ia hanya menyebutkan ada para pejabat yang seperti itu. “Lihat saja di salah satu media sosial,” katanya.

Menanggapi daya kritis prajurit TNI sekarang ini, Hasanudin mengatakan, para prajurit TNI sekarang ini diharapkan tidak hanya kritis tetapi juga pintar dalam rangka peran modernisasi yang akan datang, bukan kritis dalam soal politik. “Kritis dalam teknologi peperangan. Itu bagus menurut saya, untuk profesionalisme TNI,” ia menambahkan.



Sebelumnya, Presiden SBY menyampaikan imbauan tak hanya ditujukan kepada para menteri, tetapi juga kepada jajaran TNI/Polri. Dia meminta kepada perwira dan pejabat tinggi TNI/Polri untuk mengundurkan diri jika dia ingin aktif dalam pemilihan presiden ini.

“Kalau KSAD, KSAU dan KSAL mau mengundurkan diri saya persilakan ajukan pengunduran diri kepada saya, bahkan saya doakan. Tapi kalau di bawah itu, ajukan ke atasan masing-masing. Begitu cara yang benar,” ungkap Presiden SBY. (mp), foto : andri/parle/hr.

Komisi VII Minta Pertamina Memodernisasi Kilang Minyak

Agar bisa bersaing dengan kilang-kilang dari negara lain, PT. Pertamina diminta memodernisasi dan mengakselerasi kilang-kilangnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Komisi VII DPR ke Unit Pengelolaan (UP) IV PT Pertamina di Cilacap, Totok Daryanto saat pertemuan dengan Direksi PT Pertamina dan GM UP IV Cilacap, Jumat, (30/5)

“Kilang Pertamina UP IV Cilacap merupakan salah satu kilang terbesar yang menghasilkan 34% dari kebutuhan nasional kita, tapi dirasakan kilang-kilang kita perlu ditingkatkan dan diakselerasi agar bisa bersaing dengan kilang-kilang dari negara lain, terutama negara tetangga kita, Singapura,” kata Totok.

Menurut Totok, Singapura walaupun tidak memiliki minyak tetapi tetap punya minyak. Hal itu berarti, Singapura sudah berhasil memodernisasi kilang-kilang minyaknya, bahkan Singapura bisa mengekspor BBM dari produk kilang-kilangnya walaupun tidak punya tambang minyak.

Sementara Indonesia, ujar politisi F-PAN, memiliki tambang minyak yang saat ini terus menurun (kurang dari 1 juta barel), namun Indonesia tidak bisa mengekspor BBM ke negara lain. “Kedepan perlu dipikirkan ada *policy* yang harus diubah,” tegas Totok.

Dijelaskan Totok, selama ini hasil minyak kita, bagian kontraktornya tidak langsung digunakan Indonesia. Padahal sudah selayaknya dimana minyak itu dihasilkan, ketika negara yang menghasilkan itu membutuhkannya, maka seharusnya *privilegenya* di negara itu sendiri.

“Bagaimanapun juga minyak itu akan dikonsumsi juga. Saya kira harus di re-negosiasi kontrak-kontrak minyak



Ketua Tim Kunjungan Komisi VII DPR Totok Daryanto saat pertemuan dengan Direksi PT Pertamina Cilacap.

kita,” ujar Anggota DPR Dapil Jawa Tengah.

“Selama Indonesia masih membutuhkan minyak, maka seharusnya seluruh hasil minyak Indonesia bisa diolah sendiri di negeri kita,” tambahnya.

Namun, kata Totok, masalahnya adalah apakah kilang-kilang kita siap kalau kebijakan seperti itu dilaksanakan. Totok juga mempertanyakan problem-problem terkait dengan modernisasi kilang-kilang Pertamina.

Menurutnya, hal tersebut dipertanyakan, agar Tim Komisi VII memiliki wawasan atau informasi yang cukup untuk menjadi bahan masukan bagi Komisi VII saat memberikan masukan kepada pemerintah.

“Bagaimanapun Pertamina adalah salah satu BUMN yang menjadi kebanggaan kita bersama, dan Komisi VII bertekad untuk memajukan BUMN agar meningkatkan produktivitasnya, sehingga betul-betul kita ini mampu mandiri di bidang energi untuk kebutuhan di dalam negeri,” tandanya.

(sc) Foto: suciati/parle/hr.

Sidang APA di Jakarta, Pesan Penting untuk Dunia

Pelaksanaan sidang *Asian Parliamentary Assembly* (APA) di Jakarta 2-5 Juni 2014 diharapkan dapat menjadi pesan penting kepada dunia bahwa ditengah tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden, Indonesia masih dapat menyelenggarakan pertemuan internasional. Ini menunjukkan demokrasi yang terus tumbuh di negeri ini sudah semakin baik.

“Di tengah kesibukan kita menyelenggarakan Pemilu

Presiden, ada revitalitas antar kandidat dan pendukungnya, Indonesia tetap sejuk dan damai serta bisa menyelenggarakan forum internasional secara baik. Ini perlu kita tunjukkan kepada masyarakat dunia,” kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung kepada wartawan usai membuka secara resmi sidang *Standing Committee on Economics Affairs* di Sasono Mulyo, Hotel LeMeridien, Jakarta, Selasa (3/6/14).

Ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan sidang di Jakarta membahas pergolakan politik di Timur Tengah atau yang dikenal juga dengan Arab Spring, Politisi FPDIP menjelaskan hal tersebut tidak bisa dibahas secara resmi. “Standing Committee APA ini membahas masalah ekonomi dan *sustainable development* jadi tidak berkaitan dengan politik tetapi kita lebih bicara mengenai masalah ekonomi, energi, *poverty* dan kemiskinan,” tuturnya.

Baginya masalah Arab Spring lebih kepada urusan dalam negeri masing-masing negara namun ia tidak menafikan isu tersebut bisa saja dimunculkan peserta sidang yang sebagian ada yang bersinggungan langsung dengan Timur Tengah.

Dalam kasus ini menurutnya Indonesia bisa menjadi role model bagi negara lain yang ingin mengembangkan demokrasi. Sebagai negara yang multi etnik dan kultur dengan lebih dari 17 ribu pulau bangsa ini berhasil menyelesaikan persoalan demokrasi yang tidak kalah peliknya.

“Kita sebagai bangsa harus bersyukur, karena kita sejak Indonesia merdeka *founding fathers* sudah menetapkan ideologi bangsa, konstitusi. Itulah yang menyelamatkan bangsa kita sampai saat ini. *Role model* inilah yang kita tularkan ke-



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

pada negara lain,” demikian Pramono. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

Diversifikasi Energi Akan Terus Dilakukan



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menerima Jawaban Pemerintah dari Menkeu Chatib Basri.

Pemerintah akan terus mengupayakan diversifikasi energi dalam rangka meningkatkan efisiensi energi dan sekaligus dalam konteks ketahanan energi baik jangka menengah maupun jangka panjang. “Dari sisi pengelolaan permintaan, harga BBM dalam negeri yang relatif kompetitif dapat dijadikan sarana untuk mengendalikan konsumsi yang berlebihan dan tidak efisien,” ungkap Menkeu Chatib Basri saat menyampaikan tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi-fraksi DPR mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015 di Jakarta, Selasa (3/6).

Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, lebih lanjut Menkeu mengatakan, pemerintah juga mengupayakan konversi BBM ke LPG untuk kepentingan rumah tangga akan segera dituntaskan. Pemerintah

juga telah mendorong upaya peningkatan konsumsi Bahan Bakar Nabati (BBN) dan pemakaian Bahan Bakar Gas (BBG) khususnya di kota-kota besar.

Dalam penyediaan listrik, sambung Chaib Basri, Pemerintah juga mengupayakan peningkatan penggunaan bio-diesel dan *pure palm oil* sebagai tenaga pembangkit, selain tetap mempertahankan batu bara dan panas bumi.

Sedangkan dari sisi penawaran, Pemerintah akan terus mengoptimalkan produksi dalam negeri, terutama selain minyak seperti gas, batu bara dan bio diesel serta panas bumi. “Perbaikan berbagai regulasi, kemampuan teknologi dan dukungan insentif fiskal diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan energi tersebut,” jelasnya.

Menanggapi permintaan DPR untuk mengupayakan peningkatan penerimaan perpajakan dan *tax ratio*, Menkeu menyatakan *tax ratio* masih berpotensi untuk dioptimalkan. Karena itu Pemerintah telah dan akan tetap berusaha melakukan langkah-langkah nyata dalam mengoptimalkan pemungutan penerimaan pajak dan terus melakukan upaya perbaikan dari tahun ke tahun.

Dalam 10 tahun terakhir, kontribusi penerimaan perpajakan telah meningkat 56,5 % pada tahun 2003 menjadi 75,0 % pada tahun 2013. Secara nominal, penerimaan perpajakan meningkat dari Rp 115,9 triliun pada tahun 2003 menjadi Rp 1.077,3 triliun pada tahun 2013, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 16,1 % pertahun. (mp), foto : andri/parle/hr.

Legislator Prihatin Pemberitaan TV

Sejumlah stasiun TV telah melakukan pemihakan dalam pemberitaan maupun komentar-komentar serta editorialnya. Semestinya televisi adalah sebuah ruang publik yang harus dimanfaatkan oleh semua partai politik maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden supaya masyarakat memperoleh informasi yang seimbang.

Demikian dikatakan anggota Komisi I DPR Heri Akhmadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Ramadhan Pohan di Gedung Nusantara II Senayan Jakarta, Senin (2/6) siang.

Menurut Heri, keberpihakan salah satu stasiun TV ke salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK, sementara televisi lainnya berpihak kepada salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Hatta. Bahkan beberapa kelompok TV lainnya dinilai oleh KPI bukan hanya porsi pemberitaannya yang lebih banyak tetapi juga durasinya dinilai lebih condong kepada Prabowo-Hatta.



Anggota Komisi I DPR Heri Akhmadi.

Ketidaknetralan itu, kata politisi PDI Perjuangan ini juga dinilai adanya pemanfaatan siaran untuk kepentingan perorangan, golongan atau kelompok tertentu. Prinsip berimbang tidak dijalankan karena tidak diberikannya ruang atau waktu pemberitaan masing-masing pihak secara proposional.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan mengakui telah menemukan ketidakberimbangan yang

menonjolkan tokoh politik yang terafiliasi dengan lembaga penyiaran serta pemberitaan yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Bahkan didapati sejumlah pemberitaan negatif terhadap partai politik tertentu. Menjelang pelaksanaan pilpres, KPI kembali mengingatkan Lembaga Penyiaran untuk menjaga netralitas dan tidak mengutamakan kepentingan kelompok tertentu agar menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.

Lembaga Penyiaran juga diminta tidak menyiarkan iklan politik dan iklan kampanye diluar jadwal kampanye yang telah ditetapkan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga melarang iklan yang bernada menyerang Capres lain.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, KPI meminta Lembaga Penyiaran menayangkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) non partisan tentang penyelenggaraan Pemilihan Presiden Juli mendatang. (Spy), foto : andri/parle/hr.

DPR Dorong APA Beri Perhatian pada Energi Terbarukan

Semakin meningkatnya konsumsi energi di dunia memaksa banyak negara mulai melakukan sejumlah penelitian pada pengembangan energi terbarukan. Isu ini menjadi perhatian dalam Sidang *Standing Committee on Economic Affair* terutama pada sesi bahasan tentang *Integrated Energy Market in Asia*.

“Kita delegasi DPR akan berupaya mendorong agar bahasan tentang *renewable energy* atau energi terbarukan ini menjadi perhatian dalam sidang *Standing Committee* di Jakarta ini. Ini penting karena kebutuhan energi semakin besar sementara energi fosil menipis,” kata anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP - DPR Nazarudin Kiemas di Jakarta, Selasa (3/6/14).



Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP - DPR Nazarudin Kiemas.

Hal senada disampaikan anggota delegasi parlemen Arab Saudi Saeed Alsheikh yang meminta Organisasi Parlemen Asia meningkatkan inisiatif memajukan pengembangan energi terbarukan. Secara khusus ia mengusulkan sebuah program untuk membantu negara-negara tertinggal mengembangkan sumber energi ini.

Nicolaos Tornaritis Ketua Delegasi Parlemen Siprus memberikan perhatian kepada pengembangan energi tenaga angin dan tenaga surya. “Pengembangan sumber energi terba-

rukan ini diharapkan memberikan efek ganda membuka peluang kerja baru,” tutur juru bicara parlemen negara yang dikabarkan menemukan potensi gas cukup besar di laut Mediterania Timur.

Sidang Komite Tetap yang membahas masalah energi ini berlangsung alot. Sejumlah negara berupaya menggodakan usulannya menjadi bagian dari resolusi sidang ini. Delegasi Cina yang diwakili oleh perwakilan kedutaannya di Jakarta Hao Yinbiao terlihat ngotot menyampaikan masukannya. Setelah

ditegur pimpinan sidang Nazarudin Kiemas bahwa hak bicara hanya diberikan kepada anggota parlemen barulah dia menahan diri.

Sampai menjelang pukul 18.00 WIB rapat belum berhasil menyetujui rancangan resolusi. Pimpinan sidang akhirnya memutuskan agar seluruh delegasi menyampaikan daftar aman-demen secara tertulis kepada sekretariat. “Pengambilan keputusan kita laksanakan esok hari,” ujar Nazarudin sambil mengetokkan palu sidang. (iky) foto:iwan armanias/parle.

Sidang APA Harus Bermanfaat Nyata Bagi Rakyat

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo meminta agar rangkaian pertemuan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 2-5 Juni 2014 tidak boleh hanya sekedar menghasilkan wacana pembahasan isu kawasan. Ia meminta persidangan yang membahas isu utama mengurangi kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan harus memberikan hasil konkrit bagi rakyat.

“Pertemuan APA tidak boleh hanya menjadi wahana intelektualisme ‘resolution drafting’ dan wacana pembahasan isu kawasan melainkan harus menghasilkan output yang terukur dan bermanfaat nyata bagi rakyat di Asia,” katanya saat menyampaikan pidato pembukaan Sidang *Standing Committee economic and Sustainable Development Affairs* di Sasono Mulyo, Hotel LeMeridien, Jakarta, Selasa (3/6/14).

Ia menyebut banyak harapan rakyat Asia pada anggota parlemennya agar menjadikan kawasan ini lebih makmur, damai dan penuh persahabatan. Organisasi Parlemen Asia menurutnya harus menjadi bagian efektif dalam mencapai tujuan besar dan mulia tersebut.

Dengan nada prihatin ia memaparkan data *Asian Development Bank* (ADB) yang menyebut terdapat 900 juta orang yang hidup dibawah kondisi kemiskinan yang ekstrim di Asia. Sebagai benua berpenduduk terpadat populasi miskin yang sangat besar ini akan memunculkan masalah sosial, ekonomi, politik dan berbagai permasalahan lainnya yang rumit, bersifat lintas batas dan masif.

“Untuk itulah kita berkumpul di Jakarta dalam kerangka kerja sama antar parlemen untuk merumuskan komitmen



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo foto bersama Delegasi Sidang *Standing Committee* APA.

dan langkah kerja bersama kita, memadukan pendekatan pembangunan berkelanjutan kepada pengentasan kemiskinan di kawasan Asia,” papar politisi FPDIP ini.

Pembukaan Sidang *Standing Committee economic and Sustainable Development Affairs* turut dihadiri Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat dan Asisten Sekjen APA Ali Khorram.

Rangkaian upacara pembukaan juga diwarnai sajian seni budaya Indonesia, Tari Piring dari Sumatera Barat. Delegasi organisasi parlemen yang berasal dari 12 negara di Asia ini memberikan tepuk tangan meriah sebagai apresiasi kepada tim kesenian yang menari lincah dengan piring ditangan diantara meja peserta sidang. (iky), foto : iwan armanias/parle/hr.



Komisi II Minta Oknum KPU Main Politik Uang Dihukum Berat



Pimpinan Komisi II DPR berdialog dengan Pimpinan KPU.

Kalangan anggota Komisi II DPR meminta oknum-oknum penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang melakukan pelanggaran dengan main politik uang supaya ditindak tegas dan dihukum berat. Mereka mengharapkan agar dalam pilpres mendatang tidak ada lagi oknum-oknum KPU, Bawaslu, Panwaslu di daerah yang ikut bermain curang, sebagaimana pengalaman di pileg. Dengan demikian hasil pilpres bisa diterima semua pihak.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu di gedung DPR, Senayan, Rabu (5/6). Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dari Fraksi PDI Perjuangan, diantaranya Murad U Nasir, Gamari Sutrisno, Malik Haramain dan Salim Mengga mengharapkan KPU dan Bawaslu memberi pembinaan kepada petugas di daerah akan kecurangan di pileg tidak terulang di pilpres.

Murad U Nasir dari FPG mempertanyakan apakah oknum yang sudah dipidana atau dipenjarakan ada pejabat atau hanya bawahan saja. Gamari Sutrisno dari FPKS mengharapkan pengalaman pileg bisa dijadikan pelajaran bagi KPU dan Bawaslu pada pilpres. Petugas penyelenggara pemilu di daerah-daerah

harus diberikan pembinaan yang intensif agar perilaku oknum yang sangat tercela bisa dihindari. Mereka itulah adalah aktor yang sangat penting dalam menentukan pilpres yang berintegritas dan damai.

“Saya minta atensi yang sangat serius agar mereka mengindahkan apa yang disampaikan KPU maupun Bawaslu. Fakta di lapangan aparat dibawah tidak sepenuhnya mematuhi,” jelas Gamari.

Dia juga menegaskan, harus ada upaya untuk melakukan agar tidak ada intervensi yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan atau mendegradasi salah satu pasangan capres-cawapres. Kalangan masyarakat bahkan Presiden SBY yang menyampaikan kekhawatirannya cukup beralasan, sehingga bisa dicegah adanya intervensi kekuasaan. “Apapun bisa dilakukan ketika kekuasaan ikut campur,” ujarnya lagi.

Malik Haramain dari FPKB menyampaikan hal senada, KPU dan Bawaslu Pusat hingga Kabupaten diakui lebih netral, tetapi di tingkat kecamatan hingga paling bawah ada oknum yang melakukan kecurangan secara masif. Dalam pilpres perlu ditekankan pengawasan penghitungan suara sehingga

pelaksanaan pilpres jauh lebih bagus, lebih demokratis jauh obyektif dan lebih adil sehingga legitimasi hasil pilpres lebih kuat.

“Meskipun dalam deklarasi pasangan capres-cawapres siap kalah dan siap menang, tetapi KPU perlu mengantisipasi protes-protes yang akan mengganggu legitimasi pilpres,” tekannya.

Sementara Salim Mengga dari Fraksi Demokrat meminta oknum-oknum petugas yang main suap tidak cukup hanya diberhentikan atau dipecat. Mereka tidak takut sebab telah menerima uang ratusan juta, karena itu hukuman atau sanksinya harus diperberat.

“Tindakan mereka itu sudah merupakan penipuan, sudah masuk ranah pidana sehingga tidak hanya dipenjara 3 bulan, paling sedikit setahun,” tegas Mengga.

Dalam penjelasannya Ketua KPU Husni Kamil Manik menyebutkan, hingga saat ini DKPP telah memberhentikan penyelenggara pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS meliputi, 7 anggota KPU Kabupaten/Kota dan 15 anggota PPK.

Penyelenggaraan pemilu yang diberhentikan oleh KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 32 orang KPU Kabupaten/Kota, 170 anggota PPK, 171 anggota PPS dan 291 anggota KPPS. Yang mendapat teguran sebanyak 17 anggota KPU Kabupaten/Kota, 102 anggota PPK dan 46 anggota PPS serta 56 anggota KPPS.

Penyelenggaraan pemilu yang dijatuhi hukuman penjara sebanyak 5 orang anggota KPU Kabupaten/Kota, seorang anggota PPK, 3 anggota PPS dan 8 anggota KPPS. Namun ada yang direhabilitasi yaitu seorang anggota KPU Propinsi dan 6 anggota KPU Kabupaten. Sedangkan yang dalam proses tindak lanjut adalah 31 anggota KPU Kabupaten, 57 anggota PPK dan 58 anggota PPS. (mp) foto:ry/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Sekjen DPR RI, Karo Humas dan Pemberitaan menerima Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji. Kamis (5/6) Foto: Andry/Parle/Hr.



Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman menerima Dubes Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin. Kamis (5/6) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima Delegasi Komisi Yudisial dipimpin Ketuanya Suparman Marzuki terkait pemotongan anggaran, Kamis (5/6) Foto: Iwan Armanias/Parle/HR.



Pansus RUU MD 3 RDP dengan Sekjen DPR, MPR, dan DPD, Rabu (4/6) Foto: Naefurodjie/Parle/Hr.

